



KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA



KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN KEGIATAN

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERIODE TRIWULAN I
TAHUN 2024

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. Dasar Pelaksanaan Tugas Tim

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-14/MBU/S/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

II. Tujuan Kegiatan

Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini dimaksudkan agar akselerasi proses pemenuhan permohonan informasi publik serta kelengkapan infrastruktur pendukung pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

III. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dilakukan sebagaimana ketetapan dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-14/MBU/S/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

IV. Sumber Pembiayaan

Biaya kegiatan dibebankan pada DIPA Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2023 4406.EBA.001.054.E.521213.

V. Pelaksanaan Kegiatan

Selama periode Triwulan I Tahun 2024, Tim telah melakukan kegiatan berupa:

1. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik dan Penjawaban Permohonan Keberatan,
2. Pengkoordinasian Pemenuhan Permohonan Informasi dan Keberatan,
3. *Kick Off Meeting* Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi,
4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2023,
5. Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan,
6. Penyusunan Laporan Bulanan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bulan Februari 2024,
7. Pembahasan Rencana Inovasi Website PPID Tahun 2024.

VI. Pencapaian Output

Output kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara periode Triwulan I tahun 2024, sebagaimana terlampir.

KEGIATAN TIM SELAMA TRIWULAN I TAHUN 2024

Selama bulan Januari - Maret 2024, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian BUMN melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Dalam rangka pemenuhan permohonan informasi pada bulan Januari-Maret 2024, Tim telah menerima permohonan informasi sebanyak 137 permohonan informasi yang secara keseluruhan telah diselesaikan. Sebagian besar permohonan informasi melalui portal PPID (<https://ppid.bumn.go.id>) terkait lowongan kerja.

2) Penjawaban Permohonan Keberatan

Dalam rangka penjawaban permohonan keberatan pada bulan Januari-Maret 2024, Tim telah menerima permohonan keberatan sebanyak 28 permohonan keberatan yang secara keseluruhan telah diselesaikan. Sebagian besar permohonan keberatan melalui portal PPID (<https://ppid.bumn.go.id>) terkait proses rekrutmen pekerjaan.

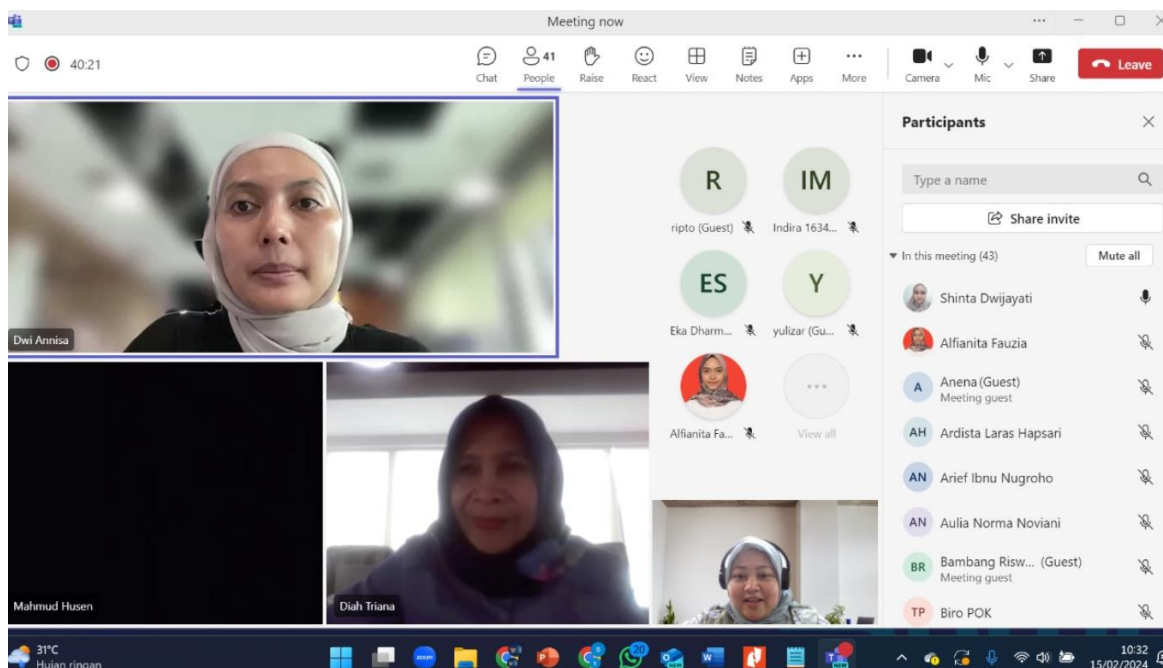
3) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi di BUMN

Dalam rangka mendorong keaktifan BUMN dalam keterbukaan informasi sebagaimana arahan Menteri BUMN, melalui Undangan Sekretaris Kementerian BUMN kepada 8 (delapan) BUMN yang mendapatkan predikat tidak informatif dengan didampingi oleh Pimpinan Tinggi Pratama sebagai pembina BUMN dan 2 (dua) BUMN yang mendapatkan predikat informatif telah terlaksana Evaluasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi sebagaimana Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023.

4) Kick Off Meeting Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- a) Sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-14/MBU/S/02/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Tim PPID), maka telah dilaksanakan *Kick Off Meeting* Tim PPID pada tanggal 15 Februari 2024 secara virtual. Kegiatan tersebut diikuti oleh PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi.
- b) Pokok pembahasan pada kegiatan *Kick Off Meeting* tersebut terutama mengenai kinerja pelayanan informasi pada tahun 2023, tugas-tugas dalam keanggotaan tim yang terbagi dalam Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, Petugas Pelayanan Informasi, serta rencana kerja Tim.
- c) Dalam sesi tersebut juga disampaikan tentang mekanisme pelayanan informasi publik dalam rangka pemenuhan permohonan yang dilakukan dengan norma waktu 10 + 7 hari kerja sehingga diharapkan menjadi perhatian seluruh Anggota Tim.

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA



- d) Dalam rangka perlu peningkatan kualitas pelayanan informasi publik secara kontinyu dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah mengusulkan pengembangan sistem pelayanan informasi publik tahun 2024 berupa **Ensiklopedia Istilah BUMN (“BUMNpedia”)**, yang didesain berupa halaman khusus pada website PPID yang bertujuan sebagai sarana edukasi masyarakat dengan menyajikan informasi tentang istilah-istilah yang berlaku di BUMN.
- e) Lebih lanjut, Tim PPID juga membahas rencana kerja yang akan dilakukan dalam kurun waktu tahun 2024, sebagaimana tabel berikut:

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIC INDONESIA



RENCANA KERJA PPID

No.	Uraian	Output	Bulan
1	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Tahun 2023	1 (satu) Dokumen	Terlaksana
2	Usulan inovasi Pelayanan Informasi	Rencana inovasi PPID	Terlaksana
3	Kick Off Meeting Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Rencana Kerja PPID	M-III Februari
4	Penyusunan Konten Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik di Media Sosial	8 (delapan) konten	M-IV Maret
5	Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Usulan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Kecualikan	Usulan DIP dan DIK	M-I Mei
6	Workshop Keterbukaan Informasi publik di BUMN	Kegiatan	M-II Maret
7	Pembuatan Video Q&A Pelayanan Informasi Publik	1 (satu) video	M-II Mei
8	Penetapan Daftar Informasi Publik & Daftar Informasi Dikecualikan	2 (dua) Dokumen	Juli - September
9	Workshop Asistensi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi	Pengisian kuesioner e-monev	M-II Mei
10	Penyusunan Register Permohonan Informasi Publik	Matriks permohonan informasi publik	M-II Juni
11	Koordinasi Pengumpulan Data Dukung Kuesioner	data dukung kuesioner	Juli - September
12	Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi	1 (satu) bahan paparan	Oktober
13	Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Triwulanan	4 (empat) Dokumen	Triwulanan

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

5) Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN Tahun 2023

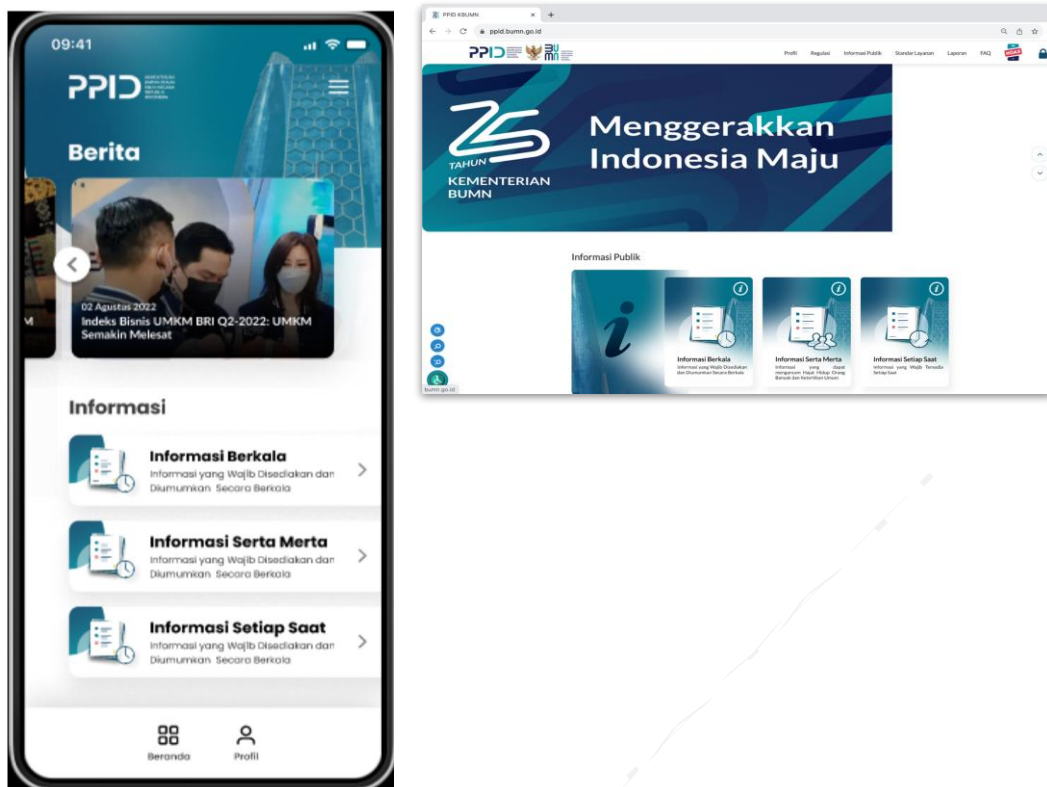
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam hal ini, pelaksanaan tugas PPID dilakukan melalui koordinasi antar fungsi serta melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas pengelolaan PPID serta pelaksanaan proses pemenuhan dan pengelolaan informasi publik sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/08/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada pasal 5 ayat (2) huruf h bahwa salah satu pelaksanaan kewajiban Badan Publik yaitu menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi, maka PPID menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2023 kepada Ketua Komisi Informasi Pusat melalui surat Nomor S-1/S.MBU/B/01/2024 tanggal 4 Januari 2024.

Pada tahun 2023, PPID Kementerian BUMN melakukan pengembangan terhadap website (<https://ppid.bumn.go.id/>) dan aplikasi PPID Kementerian BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemohon informasi yang meliputi:

- a. Redesign Website (<https://ppid.bumn.go.id/>) dan Aplikasi Mobile PPID dengan memperkuat sistem keamanan
- b. Fitur website PPID yang inklusif (bagi pengguna disabilitas) berupa magnifier /enlarge font (Zoom In dan Zoom Out) serta invert colors black and white;
- c. Fitur penyajian informasi konten infografis seputar **hoax** di Kementerian BUMN maupun di BUMN.

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Peran aktif Kementerian BUMN dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2023 ditunjukkan melalui penghargaan Keterbukaan Informasi Publik yang diraih pada tahun 2023 dengan kategori “**Informatif**”. Inovasi dan kolaborasi berkelanjutan serta penyediaan data dan informasi yang lengkap menjadi pendukung capaian skor keterbukaan informasi publik di tahun 2023.

Lebih lanjut di tahun 2023, PPID Kementerian BUMN juga turut mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di BUMN melalui program-program kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi layanan informasi dengan berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana antara lain:



**Workshop Keterbukaan Informasi Publik di
Kementerian BUMN dan BUMN**



**Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi PPID
di lingkungan K/L**

6) Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan

Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan serta guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam pelaksanaan ketentuan dimaksud dan sebagaimana diatur dalam pasal 45 Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali, PPID melakukan inventarisir usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan melalui Nota Dinas Nomor ND-83/S.MBU.B/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan Lingkungan Kementerian BUMN Tahun 2024 kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian BUMN.

Dari hasil inventarisasi Usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan, terdapat 3 (tiga) unit yang menyampaikan usulan, yaitu Asdep Industri Pangan dan Pupuk, Asdep Jasa Asuransi dan Dana Pensiun, dan Asisten Deputi Bidang Keuangan.

7) Pembahasan Rencana Inovasi Website PPID Tahun 2024

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Untuk itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perlu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat dalam rangka penyediaan informasi publik melalui pengembangan

dan peningkatan infrastruktur layanan informasi publik di lingkungan Kementerian BUMN. Pada pengembangan inovasi aplikasi website PPID tahun 2024, PPID telah mengusulkan pengembangan fitur berupa:

- a) Ensiklopedia istilah BUMN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pemberian informasi terutama pada masyarakat yang awam terhadap istilah-istilah terkait BUMN atau korporasi pada umumnya, fungsi ensiklopedia yang menampilkan istilah-istilah terkait BUMN dapat menjadi nilai tambah bagi website PPID.

b) Filter kategori pada halaman admin PPID

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Kementerian BUMN, diperlukan tambahan kolom “kategori” pada admin sehingga bisa memetakan topik kebutuhan layanan informasi masyarakat. Dengan catatan, kolom kategori tersebut bisa terus berkembang seiring permohonan informasi yang sering diterima.

c) Penambahan fungsi dashboard admin PPID

Dalam rangka membantu proses analisis dan pelaporan pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID, diperlukan dashboard admin PPID, yang didalamnya memuat informasi data permohonan informasi, permohonan keberatan, lama pemrosesan, kategori permohonan, tindak lanjut permohonan, dan hasil survei kepuasan pelayanan informasi melalui PPID.

Dalam rangka pengembangan inovasi dimaksud, Perwakilan Tim PPID telah melakukan pembahasan dengan perwakilan Keasdepan Teknologi Informasi dalam rangka pemetaan rencana dan kebutuhan aplikasi pada 19 Maret 2024.

VII. Penutup

Demikian ini laporan ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 3 April 2024

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Fasilitasi Dukungan Strategis
Selaku PPID Kementerian BUMN,



Ditandatangani secara elektronik

Rachman Ferry Isfianto

NIP 197202271998031002